

Sekda Baubau La Ode Darussalam Tekankan Disiplin ASN dan Percepatan Administrasi Jelang Audit BPK



Laporan: Amat Jr, Baubau Post-Durasi Times

BAUBAU, BPPemerintah Kota Baubau mempercepat pembenahan administrasi keuangan dan penataan aset daerah menjelang pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Baubau, La Ode Darus Salam, S.Sos., M.Si., saat memimpin apel pagi rutin di halaman Kantor Wali Kota Baubau, Palagimata, Senin (26/01/2026).

Sekda menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan dilaksanakan entry meeting bersama BPK RI dan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemeriksaan tersebut akan berfokus

Lanjut ke Hal: 7

Kominfo Buton Selatan Percepat Integrasi Satu Data Indonesia, Pemkab Butsel Siapkan Instalasi Ulang Sistem

Laporan: Firman

BUTON SELATAN , DT- Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Buton Selatan terus berupaya memperbaiki dan mengaktifkan sistem Satu Data Indonesia (SDI) sebagai basis data resmi pemerintah daerah.

Kepala Dinas Kominfo Buton Selatan, Aris Hardian, mengungkapkan bahwa hingga saat ini implementasi SDI di Buton Selatan belum sepenuhnya aktif karena kendala teknis pada tahap instalasi sistem.

“Untuk Satu Data Indonesia di Buton Selatan memang masih kita upayakan perbaikannya. Kemarin sempat gagal instalasi, sehingga saat dibuka



Kadis Kominfo Busel Aris Hardian

melalui web masih bermasalah,” ujar Aris saat diwawancarai pada awak media BaubauPos, Senin (26/1/2026).

Ia menjelaskan, dalam waktu dekat pihaknya bersama Bappeda akan

melakukan koordinasi langsung ke Bappenas untuk melakukan instalasi ulang sistem SDI tersebut.

“Nanti setelah berhasil diinstal ulang, baru

Lanjut ke Hal: 7

Tiga Ancaman Serius Pemekaran Daerah, Analisis Dr Moh Tasdik, M.Si



PEMEKARAN daerah, yang seharusnya menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik, kini menghadapi tiga tantangan fundamental yang dapat menggagalkan tujuan mulia pemerintahan Moh. Tasdik mengidentifikasi politik uang, free rider, dan politik identitas sebagai tiga faktor krusial yang mengancam kesuksesan pemekaran daerah di Indonesia.

Politik Uang: Ketika Aspirasi Rakyat Tergadai Menurut Tasdik, politik uang telah menjadi penyakit kronis dalam proses pemekaran daerah. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada level legislatif di DPR dan DPRD, tetapi juga merambah hingga ke akar rumput masyarakat. Praktik politik uang mengubah diskursus pemekaran dari kepentingan rakyat menjadi ajang tran-

saksional elite politik.

Dalam konteks pemekaran, politik uang beroperasi dalam beberapa bentuk. Pertama, ada praktik lobi-lobi politik di tingkat nasional untuk mendapatkan persetujuan DPR. Kedua, terjadi mobilisasi dukungan masyarakat melalui pemberian insentif material, bukan melalui edukasi dan dialog substansial. Ketiga, kompetisi antar calon pemimpin daerah baru yang sudah dimulai sejak proses pemekaran masih bergulir, menciptakan ekosistem transaksional yang merusak.

Tasdik menekankan bahwa ketika politik uang mendominasi, pemekaran daerah kehilangan esensinya sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan. Yang terjadi adalah redistribusi kekuasaan dan akses ekonomi politik di antara elite, bukan redistribusi pembangunan untuk rakyat. Daerah

baru yang lahir dari rahim politik uang cenderung mewarisi budaya korupsi dan patronase yang akan menghambat pembangunan jangka panjang.

Free Rider: Parasit dalam Sistem Pemekaran

Konsep free rider dalam pemekaran daerah dijelaskan Tasdik sebagai fenomena dimana kelompok atau individu tertentu menikmati manfaat pemekaran tanpa memberikan kontribusi proporsional, bahkan cenderung menjadi beban bagi daerah baru. Ini adalah problem struktural yang sering terabaikan dalam diskusi pemekaran.

Free rider dalam konteks ini memiliki beberapa manifestasi. Ada elite politik yang memanfaatkan momentum pemekaran untuk meraih posisi kekuasaan di daerah baru tanpa memiliki kompetensi atau komitmen mem-

Lanjut ke Hal: 7

Wamendagri Bima Arya Terima Usulan Pembentukan Provinsi Luwu Raya Dari DPRD Tana Luwu



Laporan: Mashuri

JAKARTA, BP-Aspirasi pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Tana Luwu kembali menguat di tingkat nasional setelah sejumlah delegasi DPRD dari wilayah Tana Luwu melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (26/1/2026). Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi DPRD

Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi).

Dalam pertemuan itu, delegasi dari empat daerah yang dikenal sebagai Tana Luwu , Kabupaten Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Kota Palopo”menyampaikan secara langsung aspirasi masyarakat terkait pemekaran daerah otonom baru (DOB). Mereka berharap pemerintah pusat membuka kembali ruang evaluasi terhadap kebijakan moratorium pemekaran wilayah.

Wamendagri Bima Arya menyatakan bahwa

aspirasi tersebut menjadi perhatian pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa masukan dari daerah akan menjadi bahan pertimbangan dalam melihat kemungkinan pencabutan moratorium DOB.

“Kami menerima aspirasi ini dan tentu menjadi masukan penting bagi pemerintah,” ujar Bima Arya.

Bima Arya juga menyampaikan apresiasi atas keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam

Lanjut ke Hal: 7

Sekda Baubau La Ode Darussalam Tekankan Disiplin ASN dan Percepatan Administrasi Jelang Audit BPK

pada pelaksanaan kegiatan anggaran per 31 Desember 2025.

“Besok, Selasa (27/01/2026), entry meeting BPK akan dilaksanakan. Saya instruksikan seluruh pimpinan OPD memastikan kelengkapan dan kerapian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sejak Januari hingga Desember 2025,” tegas La Ode Darus Salam di hadapan peserta apel.

Selain kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, Sekda juga menyoroti OPD yang belum menuntaskan penandatanganan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Ia meminta

proses tersebut segera diselesaikan tanpa penundaan guna menjamin kelancaran administrasi pemerintahan.

Menurutnya, ketertiban administrasi bukan hanya menyangkut kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menjadi indikator profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Baubau saat ini juga tengah melakukan penataan Barang Milik Daerah (BMD) secara menyeluruh. Penataan ini dilakukan sebagai dampak dari adanya rotasi pejabat serta

penggabungan (merger) sejumlah perangkat daerah.

Sekda menjelaskan bahwa proses inventarisasi dan penyesuaian aset tersebut telah diatur melalui surat edaran resmi dan ditargetkan rampung paling lambat 2 Februari 2026. Oleh karena itu, setiap pimpinan OPD diminta bertanggung jawab penuh terhadap aset di lingkup instansinya.

Ia menegaskan, penataan aset yang akuntabel sangat penting untuk memastikan transisi organisasi berjalan tertib serta menghindari potensi persoalan hukum dan administrasi di kemudian hari.

dian hari.

Pada bagian akhir arahnya, La Ode Darus Salam juga mengingatkan bahwa agenda perjalanan dinas pimpinan daerah tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan publik maupun kedisiplinan aparatur.

“Wali Kota dan Wakil Wali Kota mengharapkan kinerja kita terus ditingkatkan. Kami diberikan amanah untuk memastikan roda pemerintahan berjalan optimal. Kedisiplinan adalah cermin profesionalisme kita sebagai pelayan masyarakat,” pungkasnya.(*)

Tiga Ancaman Serius Pemekaran Daerah, Analisis Dr Moh Tasdik, M.Si

bangun daerah. Ada juga pengusaha atau kelompok ekonomi yang mengeksploitasi peluang bisnis dari pemekaran”seper ti pengadaan infrastruktur dan layanan pemerintahan”tanpa reinvestasi untuk pembangunan lokal.

Lebih jauh, Tasdik mengidentifikasi bahwa free rider juga bisa berupa institusi atau kelompok masyarakat yang menuntut alokasi anggaran dan fasilitas dari daerah baru tanpa mau berkontribusi dalam pembangunan ekonomi atau pajak daerah. Fenomena ini menciptakan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban yang pada akhirnya membebani fiskal daerah pemekaran.

Dampak sistemik dari free rider adalah rendahnya produktivitas ekonomi daerah baru dan ketergantungan berlebihan pada transfer fiskal dari pemerintah pusat. Daerah pemekaran yang seharusnya mandiri malah menjadi beban fiskal nasional karena dipenuhi oleh aktor-aktor yang hanya mengambil tanpa memberi.

Politik Identitas: Memecah untuk Menguasai

Ancaman ketiga yang disoroti Tasdik adalah politik identitas yang mengeksploitasi perbedaan etnis, agama, atau kedaerahan untuk mendorong agenda pemekaran. Ini adalah strategi paling berbahaya karena tidak hanya mengagalkan pemekaran, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial berkepanjangan.

Politik identitas dalam pemekaran beroperasi dengan menjual narasi bahwa kelom-

pok tertentu terpinggirkan dan membunuh daerah sendiri untuk berkembang. Narasi ini sering kali disederhanakan dan dimanipulasi untuk kepentingan elite tertentu. Yang terjadi bukan dialog konstruktif tentang tata kelola yang lebih baik, melainkan polarisasi berbasis identitas primordial.

Tasdik mencontohkan bagaimana retorika “kami butuh pemimpin dari suku kami” atau “daerah kami harus dipimpin oleh orang yang satu agama” menjadi justifikasi pemekaran. Padahal, masalah fundamental pembangunan daerah adalah soal kompetensi kepemimpinan, efisiensi birokrasi, dan partisipasi publik”bukan identitas pemimpin.

Ketika politik identitas mendominasi, pemekaran menciptakan fragmentasi sosial alih-alih integrasi. Daerah baru yang terbentuk akan cenderung eksklusif, diskriminatif terhadap kelompok minoritas, dan rentan terhadap konflik horizontal. Energi yang seharusnya untuk pembangunan malah tersedot untuk mengelola ketegangan sosial.

Sinergi Destruktif: Ketika Tiga Faktor Bertemu

Yang paling mengkhawatirkan, menurut analisis Tasdik, adalah ketika ketiga faktor ini beroperasi secara bersamaan. Politik uang menyedikan resources untuk memobilisasi politik identitas. Politik identitas menciptakan loyalitas buta yang memungkinkan free rider berkembang tanpa akuntabilitas. Dan free rider melanggengkan politik uang karena mereka butuh patronase untuk mempertahankan posisi.

Sinergi destruktif ini menciptakan siklus yang sulit diputus. Daerah pemekaran yang lahir dari kombinasi ketiga faktor ini akan mengalami krisis legitimasi, inefisiensi pemerintahan, dan stagnasi pembangunan. Masyarakat yang awalnya berharap pemekaran membawa perbaikan malah mengalami kekecewaan berkepanjangan.

Jalan Keluar: Reformasi Menyeluruh

Tasdik menekankan bahwa mengatasi tiga ancaman ini membutuhkan reformasi menyeluruh dalam kebijakan dan praktek pemekaran daerah. Pertama, harus ada transparansi penuh dalam proses pengambilan keputusan pemekaran, mulai dari kajian kelayakan hingga persetujuan legislatif. Kedua, partisipasi publik yang bermakna”bukan sekadar ritual formal”harus menjadi prasyarat mutlak.

Ketiga, kriteria pemekaran harus diperkuat dengan indikator objektif yang terukur, bukan sekadar political will atau tekanan politik. Keempat, enforcement terhadap praktik politik uang harus diintensifkan dengan sanksi tegas. Kelima, edukasi publik tentang bahaya politik identitas dan pentingnya kepemimpinan berbasis kompetensi harus menjadi agenda berkelanjutan.

Pemekaran daerah adalah instrumen yang potensial untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan. Namun tanpa penanganan serius terhadap tiga ancaman yang diidentifikasi Tasdik, pemekaran justru akan menjadi mesin produksi masalah baru yang membebani bangsa ini untuk generasi mendatang.(*)

Wamendagri Bima Arya Terima Usulan Pembentukan Provinsi Luwu Raya Dari DPRD Tana Luwu

menyampaikan aspirasi secara terbuka. Ia menyebut suara dari daerah sebagai bagian penting dalam proses perumusan kebijakan nasional. “Terima kasih atas aspirasinya dari Luwu Raya,” katanya.

Di luar jalur formal DPRD, dukungan terhadap pembentukan Luwu Tengah dan Provinsi Tana Luwu juga datang dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu Raya (IPMIL Raya) tercatat aktif menggelar aksi dan menyuarakan tuntutan tersebut di berbagai daerah.

Ketua PP IPMIL Luwu, Yandi, menyatakan bahwa aksi yang dilakukan mer-

upakan bentuk ekspresi kekecewaan terhadap kondisi pembangunan di Tana Luwu. Menurutnya, selama ini wilayah tersebut dinilai belum menikmati pembangunan yang adil meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Yandi mencontohkan keberadaan tambang nikel berskala dunia di Sorowako, Luwu Timur, sebagai bukti besarnya potensi daerah. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Ia menegaskan bahwa pembentukan Kabupaten Luwu Tengah menjadi prasyarat

penting sebelum terwujudnya Provinsi Tana Luwu. Oleh sebab itu, agenda pemekaran wilayah terus diperjuangkan sebagai jalan strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan.

Sementara itu, Ketua PB IPMIL Raya, Abdul Hafid, menyebutkan bahwa rangkaian aksi yang dilakukan masyarakat juga bertepatan dengan peringatan Hari Perlawanan Rakyat Luwu pada 23 Januari 2026. Momentum tersebut dinilai sebagai simbol perlawanan terhadap ketimpangan dan bentuk kesadaran kolektif masyarakat.

Hafid menambahkan bahwa Tana Luwu memiliki kekuatan besar, baik dari sisi

kualitas sumber daya manusia maupun kekayaan alam, mulai dari sektor pertanian, kelautan, perkebunan, hingga pertambangan. Menurutnya, potensi tersebut menjadi dasar kuat bagi perjuangan pembentukan daerah otonom baru.

Selain aksi di daerah, IPMIL Raya juga menyatakan kesiapan untuk menggelar aksi lanjutan di Jakarta. Sejumlah organisasi dan lembaga asal Tana Luwu telah melakukan konsolidasi guna memperkuat perjuangan aspirasi pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Tana Luwu di tingkat nasional.(*)

Kominfo Buton Selatan Percepat Integrasi Satu Data Indonesia, Pemkab Butsel Siapkan Instalasi Ulang Sistem

bisa kita integrasikan dengan website resmi Pemda Buton Selatan,” jelasnya.

Dalam struktur SDI di daerah, Dinas Kominfo berperan sebagai wali data, sementara Bappeda berfungsi sebagai koordinator.

“Kominfo bertugas mengawal, menjaga, dan menyiapkan data

agar bisa disebarluaskan. Data ini nantinya dapat diakses oleh pemerintah maupun masyarakat umum,” kata Aris.

Ia menegaskan bahwa data yang tersedia dalam SDI merupakan data resmi pemerintah, sehingga dapat digunakan sebagai rujukan bersama. Dukung Peren-

canaan Pembangunan Daerah

Menurut Aris Hardian, keberadaan SDI memiliki manfaat besar bagi perencanaan pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

“Dengan satu data, permintaan data sektoral akan lebih mu-

dah. Perencanaan daerah bisa berbasis data yang valid, lengkap, dan terukur,” ujarnya.

Data sektoral tersebut berasal dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan nantinya akan diolah lebih lanjut oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Ke depan, data SDI

diharapkan menjadi sumber utama dalam penyusunan publikasi di Buton Selatan.

Aris menjelaskan, implementasi Satu Data Indonesia di Buton Selatan mulai dirintis sejak tahun 2023. Namun, pada awal pelaksanaannya masih terkendala keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur teknologi informasi.

“Dulu kondisi infrastruktur Kominfo memang belum lengkap. Alhamdulillah, sekarang sudah cukup siap meski SDM masih terbatas,” katanya.

Untuk percepatan integrasi, Pemkab Buton Selatan berencana mengirim perwakilan ke Bappenas, terdiri dari satu personel Kominfo yang memiliki kemampuan coding, satu dari Bappeda, serta pendamping teknis lainnya.

Selain membenahan Satu Data Indonesia, Kominfo Buton Selatan juga memfokuskan program ke depan pada penguatan diseminasi informasi publik.

“Kami akan mengaktifkan kembali media sosial Pemda dan meningkatkan

konten harian kegiatan pemerintah daerah,” ujar Aris.

Langkah tersebut bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran, roda pemerintahan di Buton Selatan tetap berjalan dan pelayanan publik tetap berlangsung.

“Ke depan, Kominfo diharapkan menjadi corong utama informasi pemerintah, baik melalui kanal resmi Pemda maupun kerja sama dengan media massa,” tutup Kepala Dinas Kominfo Buton Selatan.(*)

Menhan dan Panglima TNI Rapat Tertutup di Komisi I DPR



Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Dok. Kementerian Pertahanan

Laporan: Hamid

J A K A R - TA-Komisi I DPR RI menggelar rapat tertutup dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (26/1).

Dalam rapat, tampak hadir Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Moha-

mad Tonny Harjono, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak. Tampak juga hadir Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M Herindra.

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan rapat tersebut kuorum dengan dihadiri 29 anggota dari delapan fraksi.

Ia pun meminta persetujuan peserta agar rapat itu digelar tertutup karena berkaitan dengan kebijakan strategis negara.

“Saya mohon persetujuan karena sifat rapatnya sangat penting dan strategis yang juga bertalian erat dengan kebijakan negara yang memang tidak untuk konsumsi semua orang, saya mohon persetujuan ini

tertutup. Apakah bisa disetujui?” tanya Utut. Peserta rapat menjawab setuju. Utut lalu membuka rapat dan menyatakan rapat tertutup untuk umum.

Berdasar agenda resmi DPR, rapat ini diagendakan membahas capaian program kerja Kemhan/TNI Tahun 2025 serta rencana dan program kerja Kemhan/TNI Tahun 2026.(*)

DPR Berubah Usung Calon Hakim MK, dari Inosentius Kini Adies Kadir

Laporan: Alwan

JAKARTA-Komisi III DPR mengusulkan nama baru calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR pengganti Arief Hidayat yang akan pensiun pada Februari 2026 mendatang.

Sempat menyetujui Ketua Badan Keahlian DPR, Inosentius Samsul, Komisi III kini menyetujui nama baru yakni Adies Kadir sebagai pengganti Arief.

Rapat pleno penetapan Adies digelar secara singkat di Komisi III, Senin (26/1). Adies disetujui bulat oleh delapan fraksi DPR untuk menggantikan Arief.

“Komisi III menyetujui saudara Prof. DR. Ir. H. Adies Kadir SH, M.Hum, sebagai hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi yang berasal dari usulan DPR,” kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman selaku pemimpin rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

“Setuju?” ujar Habib meminta persetujuan dan dijawab kompak seluruh peser-



Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon hakim Mahkamah Konstitusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Komisi III DPR menyetujui Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi terpilih dari usulan DPR.

ta rapat.

Komisi III hingga kini tak mengungkapkan alasan mengganti Inosentius sebagai pengganti hakim MK Arief Hidayat. Anggota Komisi III DPR dari PDIP, Safaruddin bergeming saat ditanya soal itu.

“Nanti tanya deh Ketua Komisi III DPR lebih jelasnya,” ujar Safaruddin.

Adies saat ini merupakan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar. Nama Adies sebelumnya sempat menjadi sorotan pada

gelombang demo DPR akhir Agustus 2025.

Dia lalu dinonaktifkan oleh partainya menyusul desakan publik buntut pernyataannya soal tuntutan rumah DPR yang menjadi sorotan.

Namun, oleh MKD DPR, Adies dinyatakan tidak bersalah dan kembali aktif. Akan tetapi, sejak aktif kembali, dia tak pernah muncul di depan publik maupun wawancara media.

Sebelum menyetujui Adies, Komisi III telah menggelar fit

and proper test dan menyetujui Inosentius Samsul sebagai pengganti Arief pada Agustus 2025.

Bukan hanya di Komisi III, nama Inosentius juga telah disahkan dalam rapat Paripurna ketiga masa sidang I 2025-2026 yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurizal, pada Kamis 21 Agustus 2025.

Sementara, hingga berita ini ditulis, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman enggan merespons.(*)

Jadi Calon Hakim MK, Adies Kadir Sudah Mundur dari Golkar



sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji mengatakan Adies Kadir telah mengundurkan diri dari partai beringin menyusul pencalonannya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

JAKARTA-Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji mengatakan Adies Kadir telah mengundurkan diri dari partai beringin menyusul pencalonannya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Akan tetapi, Sarmuji tak menjawab sejak kapan Adies mengundurkan diri.

“Beliau sudah mengundurkan diri sebagai kader Golkar,” ujar Sarmuji saat dikonfirmasi, Senin (26/1).

Sarmuji mengatakan pihaknya belum menetapkan calon pengganti Adies di posisi Wakil Ketua DPR. Dia menyebut hal itu masih akan dibahas oleh Ketua Umum Bahlil Lahadalia dan

Fraksi Golkar di DPR.

“Wakil ketua DPR belum diputuskan. Fraksi masih menunggu arahan Ketua Umum dan keputusan DPP,” ujarnya.

Komisi III DPR secara resmi telah menyetujui Adies Kadir menjadi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pengganti Arief Hidayat dalam rapat pleno yang digelar pada Senin (26/1).

Usulan Adies sebagai calon hakim MK disetujui delapan fraksi Komisi III DPR. Fit and proper test digelar secara singkat tanpa pendalaman oleh masing-masing anggota atau peserta rapat.

Adies nantinya akan menggantikan Arief Hidayat yang

akan memasuki masa pensiun pada Februari 2026 mendatang.

Dia saat ini merupakan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar. Nama Adies sebelumnya sempat menjadi sorotan pada gelombang demo DPR akhir Agustus lalu.

Dia sempat dinonaktifkan oleh partainya menyusul desakan publik buntut pernyataannya soal tuntutan rumah DPR yang menjadi sorotan.

Namun, oleh MKD DPR, Adies dinyatakan tidak bersalah dan kembali aktif. Sejak aktif kembali, dia tak pernah muncul di depan publik maupun wawancara media.(*)

DPR Tetapkan 9 Komisioner Ombudsman 2026-2031, Hery Susanto Jadi Ketua

Laporan: Alwan

JAKARTA-Komisi II DPR menetapkan sembilan calon anggota Ombudsman RI untuk periode 2026-2031 lewat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar hari ini.

“Melalui forum musyawarah mufakat yang menghadirkan delapan fraksi di Komisi II DPR RI, kami tadi bersepakat menetapkan nama-nama yang telah kami umumkan,” kata Ketua Komisi II DPR, Rifqinizami Karsayuda usai rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/1).

Rifqi menjelaskan sebanyak sembilan orang

tersebut terpilih dari 18 calon anggota yang telah melewati seleksi sejak awal.

Menurut Rifqi, dari delapan nama, beberapa di antaranya merupakan anggota periode sebelumnya. Sedangkan, sisanya merupakan wajah baru.

Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, aktivis, hingga mantan anggota DPD RI.

“Mudah-mudahan apa yang kami putuskan ini bisa betul-betul sesuai dengan ekspektasi Komisi 2 DPR RI sebagai mitra kerja Ombudsman RI untuk kita semua memperbaiki kinerja dan performa Ombudsman RI di masa yang akan datang,” ujar

Rifqi.

Sembilan nama itu selanjutnya akan dibawa ke Paripurna untuk disahkan, sebelum dilantik oleh Presiden dan resmi bertugas.

Berikut daftar lengkap 9 calon anggota Ombudsman periode 2026-2031:

1. Hery Susanto (ketua)
2. Rahmadi Indra Tektona (wakil ketua)
- Anggota:
 1. Abdul Gho-far
 2. Fikri Yasin
 3. Maneger Nasution
 4. Nuzran Joh-her
 5. Partono
 6. Robertus Na Endi Jaweng
 7. Syafrida Rachmawati Ra-sahan.(*)

Aset KONI Sultra Disorot, Pengurus Libatkan Inspektorat Lakukan Penelusuran



Laporan: Mashuri

SULTRA, BP- Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulawesi Tenggara periode 2025-2029 mulai melakukan penelusuran terhadap sejumlah aset organisasi yang dilaporkan tidak diketahui keberadaannya. Langkah ini dilakukan dengan melibatkan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara guna memastikan proses berjalan sesuai prosedur.

Persoalan aset tersebut mencuat setelah dilakukan inventarisasi awal oleh pengurus baru. Dari hasil pendataan sementara, diketahui bahwa jumlah aset yang masih berada di kantor sangat terbatas dibandingkan dengan catatan sebelumnya.

Ketua Harian KONI Sultra, Sofyan, mengungkapkan bahwa sebagian besar barang inventaris tidak ditemukan. Kondisi tersebut menimbulkan

kan pertanyaan mengenai keberadaan dan pengelolaan aset yang selama ini digunakan untuk mendukung operasional organisasi.

“Setelah kami data, aset yang masih ada itu sedikit sekali. Banyak yang tidak ada, entah hilang atau bagaimana” kata Sofyan.

Adapun aset yang dilaporkan tidak diketahui keberadaannya meliputi motor trail, laptop, kamera, sejumlah peralatan olahraga, sofa, serta berbagai barang pendukung lainnya. Sebagian aset tersebut diduga tidak tercatat dengan baik atau berada dalam penguasaan pihak tertentu.

Pengurus KONI Sultra juga mengaku telah mengantongi sejumlah informasi awal terkait dugaan penguasaan aset oleh pihak-pihak tertentu. Namun, seluruh informasi tersebut masih akan diverifikasi melalui mekanisme resmi bersama Inspektorat.

Sebelumnya, ja-

garan pengurus telah menggelar pertemuan dengan Inspektorat Sulawesi Tenggara untuk membahas langkah penelusuran aset. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa proses inventarisasi dan klarifikasi aset perlu dilakukan secara terbuka dan akuntabel.

Isu aset ini turut disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (ASR), oleh salah satu pengurus KONI Sultra. Penyampaian itu dilakukan setelah gubernur membuka Musyawarah Kerja Provinsi (Muskerprov) KONI Sultra yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Kendari, Minggu (25/1/2026).

Kegiatan Muskerprov tersebut dilaksanakan di Jalan DI Pandjaitan, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Lokasi ini berjarak sekitar 7,8 kilometer atau sekitar 13 menit perjalanan dari kawasan Eks MTQ di

Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonaga.

Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menegaskan bahwa persoalan aset KONI bukan menjadi kewenangan pribadinya. Menurutnya, aset yang dibeli menggunakan anggaran pemerintah berkaitan langsung dengan tata kelola pemerintahan dan aspek hukum.

“Kalau aset itu bukan kaitannya dengan saya, tetapi kaitannya dengan pemerintah dan hukum,” ujar ASR kepada wartawan.

Ia menambahkan bahwa proses penertiban maupun pengembalian aset harus dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Oleh karena itu, pihak KONI diminta untuk menunggu proses penanganan oleh pihak yang berwenang.

“Kan tinggal menunggu siapa yang akan menertibkan atau mengembalikan aset tersebut. Jadi ini bukan persoalan dengan saya,” tutupnya. (*)

Meutya di WEF: Kecepatan Transformasi Digital ASEAN Diukur dari Pemerataan, Bukan Sekadar Teknologi

Laporan: Lisna

JAKARTA-Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa kecepatan transformasi digital di kawasan ASEAN tidak dapat diukur semata dari adopsi teknologi canggih atau besaran ekonomi digital, melainkan dari seberapa luas manfaat teknologi tersebut dirasakan

oleh masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Meutya dalam sesi diskusi “Is ASEAN Moving Fast Enough?” pada World Economic Forum 2026 di Davos.

Menurut Meutya, pertanyaan utama bukan apakah ASEAN bergerak cepat, tetapi cepat untuk siapa dan ke arah mana.

Meutya menyoro-

ti bahwa narasi kecepatan digital kerap terjebak pada angka adopsi Artificial Intelligence (AI) dan nilai ekonomi digital.

Padahal, tantangan terbesar bagi Indonesia dan ASEAN adalah memastikan teknologi tersebut dapat diakses secara merata oleh ratusan juta penduduk di kawasan.

“Bagi kami di In-

donesia dan sebagian besar negara anggota ASEAN, definisi kecepatan adalah seberapa cepat kami bisa menyebarluaskan teknologi, terutama kepada 700 juta penduduk di kawasan ini. Di Indonesia saja ada 280 juta jiwa yang tersebar di 17.000 pulau. Tantangan terbesarnya adalah memastikan teknologi

Gubernur Sultra ASR Tekankan Pembinaan dan Pemeliharaan Atlet Berprestasi

Laporan: Lisna

SULTRA, BP- Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mendukung pembinaan dan masa depan atlet daerah secara berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan dalam sambutan pada Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI Sulawesi Tenggara yang berlangsung di Aula Hotel Sahid Azizah Syariah, Minggu (25/1/2026).

Pada kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada para atlet Sulawesi Tenggara yang telah menorehkan prestasi di tingkat nasional. Menurutnya, prestasi yang telah diraih membuktikan bahwa pengelolaan olahraga yang baik dan berkelanjutan dapat menjamin masa depan atlet.

“Sesuai mars patriot olahraga, disiplin adalah nafas seorang atlet, kesetiaan adalah kebanggaan, dan kehormatan adalah segalanya. Prestasi tidak boleh berhenti hanya pada pemberian penghargaan sesaat, tetapi harus diikuti dengan perhatian terhadap masa depan atlet,” tegasnya.

Oleh karena itu,

melalui Rakerprov ini Gubernur Sultra berharap KONI Sulawesi Tenggara dapat menyusun program tahunan yang terukur, berkelanjutan, dan berorientasi pada pembinaan serta pemeliharaan atlet, sehingga prestasi olahraga Sulawesi Tenggara mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional.

Gubernur menekankan pentingnya peran KONI beserta jajaran dalam memetakan secara jelas antara program pembinaan dan program prestasi. Atlet yang belum berprestasi perlu mendapatkan pembinaan yang tepat dan terarah, sementara atlet yang telah berprestasi harus dipelihara agar capaian prestasinya tetap terjaga serta masa depannya lebih terjamin.

Olahraga adalah industri, dan atlet adalah aset daerah yang harus dijaga. Tugas KONI adalah membina dan memelihara atlet agar berprestasi, sedangkan tugas pemerintah daerah adalah memfasilitasi,” ujarnya.

Namun, Gubernur juga mengingatkan agar pengembangan prestasi atlet tidak

boleh sampai mengorbankan pendidikan formal mereka. Atlet berprestasi harus tetap mendapatkan perhatian terhadap keberlanjutan pendidikan dan kehidupan setelah masa aktif bertanding.

Lebih lanjut, Gubernur menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mendukung program-program KONI, termasuk dari sisi pendanaan. Ia meminta agar kebutuhan yang belum terpenuhi dapat disampaikan secara langsung kepada pemerintah daerah, khususnya bagi cabang olahraga yang disebut sebagai tulang punggung prestasi Sulawesi Tenggara, yaitu taekwondo, dayung, dan renang.

Kita akan memberikan penghargaan kepada atlet-atlet taekwondo. Sementara untuk cabang olahraga dayung dan renang, asramanya akan kita renovasi,” ucap Gubernur.

Gubernur Sulawesi Tenggara bersama Ketua Umum KONI Sulawesi Tenggara, Andi Ady Aksar, juga menyerahkan penghargaan kepada para atlet yang telah menorehkan prestasi pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Beladiri Tahun 2025 di Kudus. (*)



tersedia untuk semua,” ujar Meutya di Davos, Swiss, Kamis (22/01/2026).

Menurut Meutya, inklusivitas adalah bagian tak terpisahkan dari kesiapan digital.

Kecepatan infrastruktur tidak akan bermakna jika tidak dibarengi dengan kecepatan literasi digital, khususnya bagi generasi muda.

Ia menekankan bahwa bonus demografi di kawasan Asia hanya akan menjadi keuntungan nyata jika dibarengi dengan keterampilan.

“Bonus demografi hanya akan berman-

faat jika mereka terampil. Jadi, kita harus melihat seberapa cepat kita bisa mengedukasi dan meliterasi rakyat kita,” tambahnya.

Menkomdigi menjelaskan bahwa ASEAN juga tengah mematangkan Digital Economic Framework Agreement (DEFA) untuk mempercepat perkembangan ekonomi digital di kawasan.

Kerangka kerja ini dirancang bukan sekadar sebagai perjanjian dagang, melainkan sebagai “sistem operasi” yang memperkuat konektivitas antarnegara.

Salah satu bukti nyata interoperabilitas ini adalah keberhasilan sistem pembayaran digital QRIS yang kini dapat digunakan lintas negara, seperti di Thailand dan Malaysia.

Selain itu, posisi netral ASEAN juga dinilai sebagai kekuatan strategis yang membuka akses luas terhadap teknologi dan investasi dari seluruh dunia.

“Netralitas ASEAN memberikan kepastian bahwa keterbukaan kawasan ini selalu tersedia bagi seluruh dunia,” tegas Meutya. (*)

Kehadiran TNI AL di Buton Tengah Segera Terwujud, Fasilitas Telah Disiapkan



Pewarta: Kamarudin

BUTON TENGAH, BP- Pemerintah dan unsur terkait di Kabupaten Buton Tengah (Buteng) tengah mematangkan persiapan menyambut kehadiran petugas TNI Angkatan Laut (AL) yang direncanakan akan bertugas di wilayah pesisir. Kehadiran aparat TNI AL ini diharapkan memperkuat pengawasan keamanan laut sekaligus menekan praktik penangkapan ikan ilegal.

Azhari menyampaikan bahwa sejumlah fasilitas pendukung telah disiapkan untuk mendukung operasional petugas TNI AL yang akan ditempatkan di Buteng. Fasilitas tersebut meliputi asrama tempat tinggal anggota hingga sarana

transportasi laut untuk patroli pesisir.

"Kami sudah menyiapkan asrama bagi anggota, termasuk kapal speed yang akan digunakan untuk patroli di wilayah pesisir," ujar Azhari.

Selain itu, pihaknya juga tengah menyiapkan kantor sebagai pusat aktivitas dan koordinasi petugas TNI AL di daerah tersebut. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk keseriusan daerah dalam mendukung penguatan pengamanan laut.

Azhari berharap, kehadiran personel TNI AL nantinya dapat semakin memperkuat peran Polisi Air (Polair) yang selama ini telah bertugas menjaga keamanan perairan di Buton Tengah.

"Dengan adanya TNI AL, sinergi pengamanan laut akan semakin kuat dan efektif," katanya.

Lebih lanjut, Azhari juga menyampaikan peringatan tegas kepada masyarakat yang masih melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal. Ia menekankan bahwa praktik penggunaan bahan peledak, aliran listrik, maupun racun sangat merusak ekosistem laut.

"Kepada warga yang masih hobi melaut dengan cara ilegal, seperti menggunakan bom, listrik, dan racun, sebaiknya segera berhenti," tegasnya.

Ia menambahkan, dengan semakin kuatnya pengawasan aparat di wilayah perairan Buton Tengah, pelu-

ang pelaku illegal fishing untuk tertangkap akan semakin besar.

"Insya Allah, dengan pengawasan yang lebih ketat, risiko untuk ditangkap akan semakin tinggi," lanjut Azhari.

Upaya penguatan pengamanan pesisir ini dinilai penting mengingat wilayah laut Buton Tengah memiliki potensi perikanan yang besar sekaligus rentan terhadap eksploitasi yang tidak bertanggung jawab.

Pemerintah daerah berharap, langkah ini tidak hanya meningkatkan keamanan laut, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan demi kepentingan generasi mendatang. (*)

Bupati Buton Alvin Serahkan Kendaraan Operasional untuk Tingkatkan Respons Bencana



Laporan: Ardi

BUTON, BP- Upaya memperkuat kesiapsiagaan daerah terhadap potensi bencana terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Buton. Salah satunya melalui penambahan sarana operasional bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buton berupa satu unit truk serbaguna bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Bantuan kendaraan tersebut secara simbolis diserahkan langsung oleh Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, S.H., kepada jajaran BPBD Kabupaten Buton di halaman Rumah Jabatan Bupati Buton, Minggu (25/1/2026).

Bupati Alvin menegaskan bahwa kehadiran kendaraan operasional baru ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas kelembagaan BPBD, khususnya dalam mendukung kecepatan mobilisasi saat terjadi situasi darurat.

Menurutnya, tantangan kebencanaan di daerah menuntut ke-

siapan peralatan dan personel yang optimal agar respons terhadap masyarakat dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

"Dengan dukungan sarana yang memadai, saya berharap penanganan bencana di Kabupaten Buton dapat berjalan lebih siap dan cepat," ujar Alvin dalam sambutannya.

Ia juga mengingatkan bahwa aset negara yang telah diberikan harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab serta dirawat dengan baik agar dapat digunakan dalam jangka panjang.

"Kendaraan ini sangat membantu mobilitas BPBD dalam menjalankan tugas-tugas penanggulangan bencana. Saya berharap kendaraan ini dijaga dan dirawat dengan baik agar selalu siap digunakan. Perawatan itu penting, BPBD harus selalu fit," katanya.

Lebih lanjut, Bupati Alvin menilai bahwa profesionalisme BPBD tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana, tetapi juga oleh komitmen sumber daya manusia dalam menjaga kes-

iapsiagaan setiap waktu.

Dalam kesempatan tersebut, ia turut menyampaikan apresiasi atas kinerja BPBD Kabupaten Buton yang dinilai konsisten membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih responsif.

Ucapan terima kasih juga disampaikan secara khusus kepada Kepala BPBD Kabupaten Buton, Manafu, S.Sos., M.Si., beserta seluruh jajaran yang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kebencanaan di daerah.

"Terima kasih kepada Kepala BPBD Buton, Pak Manafu, bersama staf BPBD serta BNPB pusat yang terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan dan pelayanan kebencanaan untuk masyarakat Kabupaten Buton," tutup Bupati.

Dengan penambahan armada operasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Buton berharap BPBD semakin siap menghadapi berbagai potensi bencana serta mampu memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat. (*)

Perkuat Sinergitas, Kapolres Buton Terima Kunjungan Kerja Kepala Kejaksaan Negeri Buton

BUTON, BP-Kapolres Buton menerima kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Buton beserta jajaran di Mapolres Buton, Senin 26/01/26. Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat sinergitas dan koordinasi antarpenghak hukum dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pertemuan

tersebut, Kapolres Buton, AKBP Ali Rais Ndraha, S.H., S.I.K., M.M.Tr menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Kajari Buton dan menegaskan pentingnya kerja sama yang solid antara Polri dan Kejaksaan dalam menjaga stabilitas keamanan serta penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.

"Kami menyambut baik kunjungan ini sebagai bentuk komitmen bersama untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergitas, khususnya dalam penanganan perkara hukum serta pelayanan kepada masyarakat," ujar Kapolres Buton.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Buton Sterry Fendy Andih, S.H., M.H menyampaikan

bahwa hubungan baik dan komunikasi yang intens antara Kejaksaan dan Kepolisian merupakan kunci utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan terpercaya.

"Kami berharap sinergi yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus ditingkatkan, sehingga setiap pelaksanaan tugas dapat berjalan



sesuai dengan aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ungkap Kajari Buton.

Kegiatan kunjun-

gan kerja tersebut berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kehangatan, diakhiri dengan sesi diskusi serta foto bersama se-

bagai simbol soliditas dan kebersamaan antar institusi penegak hukum di Kabupaten Buton. (R1))

Muhammadiyah Miliki Emergency Medical Team Berstandar WHO



Peliput: Lisna

MAGELANG - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyebut Muhammadiyah memiliki Emergency Medical Team (EMT) yang telah memenuhi standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai bagian dari penguatan respons kesehatan pada situasi bencana. “Saya jadi ingat, EMT Muhammadiyah sudah memenuhi standar WHO, bahkan yang pertama di Indonesia,” kata Menkes Budi pada peluncuran Program Studi Kedokteran UNIMMA di

Magelang, Jawa Tengah, Kamis (8/1/2026). EMT merupakan tim medis yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan langsung di lokasi bencana. Tim ini terdiri dari tenaga kesehatan terlatih yang disiapkan untuk merespons kondisi kedaruratan secara cepat, terkoordinasi, dan sesuai standar internasional. Haedar Nashir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menegaskan pengalaman Muhammadiyah dalam layanan medis darurat: “Kami menyiapkan 25 rumah

sakit untuk menghadapi keadaan, dan pada akhirnya 86 rumah sakit Muhammadiyah terlibat dalam layanan medis, saat banyak rumah sakit lain ketakutan menangani kondisi pada masa covid,” ujar Haedar. Pengembangan EMT di lingkungan Muhammadiyah telah dilakukan sejak 2007 sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas medis kebencanaan. Pada tahap awal, pengembangan tim medis tersebut dikenal dengan nama Disaster Medical

Committee (DMC) sebelum kemudian berkembang menjadi EMT. EMT Muhammadiyah berada dalam koordinasi Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) sebagai lembaga di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menjalankan fungsi penanggulangan bencana. EMT menjadi bagian dari upaya penguatan layanan kesehatan darurat dalam mendukung sistem penanganan bencana nasional.(*)

Investasi Produksi Farmasi Dalam Negeri Krusial Hadapi Ancaman Pandemi

DEPOK - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan penguatan kapasitas produksi kesehatan nasional merupakan faktor strategis untuk melindungi Indonesia dari risiko krisis global di masa mendatang. Hal tersebut disampaikan Menkes saat peresmian Pengembangan Fasilitas Manufaktur dan Riset Bayer Indonesia di Depok, Rabu (14/1). Menurutnya, peresmian ini

menjadi langkah penting dalam memperkuat kemandirian sistem kesehatan nasional. Menkes Budi menyinggung pengalaman pandemi COVID-19 yang menunjukkan kerentanan negara yang tidak memiliki kemampuan produksi obat, vaksin, dan alat kesehatan secara mandiri. Pembatasan mobilitas internasional saat krisis membuat negara yang bergantung pada impor bera-

da dalam posisi sangat rentan terhadap gangguan pasokan. “Tanpa kapasitas industri di dalam negeri, populasi besar seperti Indonesia menghadapi risiko serius ketika terjadi wabah berskala global,” ujarnya. Ia menekankan bahwa ketahanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan pelayanan medis, tetapi juga kesiapan industri penunjang yang

mampu tetap beroperasi dalam kondisi darurat. Oleh karena itu, investasi di sektor farmasi dan kesehatan dinilai sebagai bagian dari perlindungan nasional, setara dengan pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Head of Bayer Product Supply Consumer Health Asia & ANZ PT Bayer Indonesia Priscilla Silvan Prarizta menyatakan komitmen Bayer da-

Menkes Ajak Masyarakat Tidak Takut Periksa Gejala Kusta

JAKARTA-Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengajak masyarakat untuk tidak takut memeriksakan diri apabila mengalami gejala kusta. Ia menegaskan bahwa kusta bukan penyakit mistik atau kutukan, melainkan penyakit menular yang penyebabnya telah lama diketahui secara ilmiah dan dapat disembuhkan. “Kusta bukan penyakit mistik atau kutukan. Ini penyakit yang disebabkan oleh bakteri, dan ilmu pengetahuannya sudah jelas sejak lebih dari satu abad lalu,” ujar Menkes Budi dalam media briefing terkait kondisi kusta di Indonesia, Kamis (15/1), di Perpustakaan Wisma Habibie Ainun, Jakarta. Kusta disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Terjadinya kusta merupakan hasil interaksi berbagai faktor, yaitu pejamu (host), kuman (agent), dan lingkungan. Penularan terjadi melalui kontak yang erat dan berkepanjangan dengan seseorang yang terinfeksi kusta. Gejala kusta dapat ditandai dengan munculnya bercak kulit merah atau putih yang tidak gatal, tampak mengkilap atau kering bersisik, kulit yang tidak berkeripat, ron-

toknya alis mata, pengebalan pada wajah dan telinga, serta lepuh atau luka tidak nyeri pada tangan atau kaki. Gangguan pada saraf juga dapat terjadi, seperti nyeri pada saraf tepi, kesemutan, rasa tertusuk atau nyeri pada anggota gerak, kelemahan otot atau kelopak mata, disabilitas atau deformitas tanpa riwayat kecelakaan, serta ulkus yang sulit sembuh. Menkes Budi menjelaskan bahwa pengobatan kusta telah tersedia dan terbukti efektif. Ia menekankan bahwa setelah pengobatan dimulai, risiko penularan dapat dihentikan dalam waktu singkat. “Begitu pengobatan dimulai, dalam waktu kurang dari satu minggu pasien sudah tidak menularkan lagi,” jelasnya. Namun demikian, stigma dan disinformasi masih menjadi tantangan dalam upaya penanganan kusta. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat enggan memeriksakan diri sehingga penemuan kasus sering kali terlambat. Senada dengan Menkes Budi, peneliti The Habibie Center, Ansori, menilai bahwa penanganan kusta tidak dapat dilihat han-

ya dari sisi medis. Faktor sosial, menurutnya, memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pengendalian penyakit ini. “Banyak orang yang sebenarnya sudah mengetahui dirinya terkena kusta, tetapi memilih menyembunyikannya karena takut terhadap konsekuensi sosial,” ujar Ansori. Ia menambahkan bahwa stigma dan diskriminasi membuat penderita enggan berobat, sehingga berdampak pada keterlambatan deteksi dan proses penyembuhan. Sementara itu, WHO Goodwill Ambassador for Leprosy Elimination, Yohei Sasakawa, menyebut Indonesia memiliki peran penting dalam upaya penanganan kusta secara global. “Eliminasi kusta tidak hanya tentang pengobatan medis, tetapi juga tentang menghapus stigma dan memulihkan martabat manusia,” kata Sasakawa. Melalui ajakan tersebut, Menkes Budi kembali menegaskan pentingnya peran masyarakat untuk tidak ragu memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala kusta, agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.(R2))

lam memperkuat ekosistem kesehatan nasional melalui investasi jangka panjang. “Melalui inisiatif ini, Bayer menginvestasikan 99 miliar rupiah untuk meningkatkan kapabilitas manufaktur, termasuk produksi MMS (Multiple Micronutrient Supplement), sekaligus memperkuat peran pabrik Cimanggis sebagai bagian dari pusat R&D global Bayer,” ujar Priscilla. Ia menjelaskan investasi tersebut memungkinkan pabrik Cimanggis memproduksi hingga 1,2 miliar tablet MMS per tahun serta memasok produk

ke pasar domestik dan 42 negara lainnya. “Seluruh operasional dijalankan oleh tenaga profesional Indonesia, sementara fasilitas R&D kami berfokus pada peningkatan kualitas dan optimisasi formulasi agar produk tetap aman dan efektif di berbagai kondisi iklim,” katanya. Sementara itu, Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste Ralf Beste menilai investasi Bayer mencerminkan kekuatan basis industri Jerman yang berorientasi jangka panjang. Produksi lokal dan transfer teknologi,

menurutnya, menjadi elemen penting dalam membangun ketahanan ekonomi dan kesehatan. “Kami sangat senang melihat keputusan untuk memproduksi di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai hub. Hal ini membawa manfaat berupa produksi lokal, transfer pengetahuan, serta penguatan kemitraan Jerman-Indonesia,” ujarnya. Ia menambahkan sektor kesehatan dan farmasi akan menjadi salah satu pilar utama peningkatan kerja sama ekonomi kedua negara ke depan.(*)

<div>PT FAREN GRAFIKA</div> <div></div> <div>KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN</div> <div>Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik</div> <div>Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post</div> <div>Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi</div>	<div>Pemimpin Umum: Fauzan NWA Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi Redpel: Amat Jr Korlip: Noval Redaktur: Kasrun,Rahim Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Firman</div> <div>Layouter: Ririn Pracetak: Aditya Cetak Jamaludin</div> <div>Penerbit: PT FAREN GRAFIKA Komisaris: Erna Agule Direktur Utama: Andina Latief Manager Keuangan: Nabila DAA Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin Kepala Sirkulasi: Robi Administrasi: Salvana</div> <div>Kepala Biro Wakatobi: Risman Kepala Biro Buton Utara: Kasrun Kepala Biro Buton: Rahim Kepala Biro Buton Selatan: Firman Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin Kepala Biro Sultra: Masuri Agen Baubau: Jamaluddin Agen Buton Selatan: Firman Agen Buton: Samrihan Agen Buton Utara: Kasrun Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks</div>	<div>Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com</div> <div>Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat:Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara</div>
---	---	---

Antisipasi Gangguan Kamtibmas, Kanit Binmas Polsek Lasalimu Imbau Pelajar Tertib di Jalan Raya



Laporan: Amran

BUTON, BP-Dalam rangka mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Kanit Binmas Polsek Lasalimu melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada para pelajar di wilayah hukum Polsek Lasalimu, Kabupaten Buton.

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk upaya

aya preventif kepolisian dalam menekan potensi pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas yang kerap melibatkan pelajar, khususnya saat berangkat dan pulang sekolah. Kanit Binmas mengimbau para pelajar agar senantiasa tertib di jalan raya, mematuhi peraturan lalu lintas, serta mengutamakan keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya.

Dalam imbauannya, Kanit Binmas

Aiptu Bakri juga menekankan agar pelajar tidak menggunakan kendaraan bermotor tanpa kelengkapan surat-surat, tidak ugal-ugalan di jalan, serta menghindari penggunaan knalpot bising yang dapat mengganggu ketertiban umum. Selain itu, pelajar diingatkan untuk menjauhi pergaulan negatif yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas.

“Kami berharap

para pelajar dapat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dan turut menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif,” ujar Aiptu Bakri.

Melalui kegiatan ini, Polsek Lasalimu berharap terjalin sinergi yang baik antara kepolisian, pihak sekolah, dan para pelajar dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah Kecamatan Lasalimu. (*)

Kapolri: Polri di Bawah Kementerian Melemahkan Negara dan Presiden



Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menolak wacana Polri di bawah kementerian saat rapat kerja dengan Komisi III DPR.

J A K A R T A -Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menolak wacana Polri di bawah kementerian saat rapat kerja dengan Komisi III DPR.

Sigit menyebut menempatkan Polri di bawah kementerian sama saja dengan melemahkan institusi Polri, negara, hingga Presiden.

“Saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, saya memilih Kapolri saja yang dicopot,” kata Sigit dalam rapat di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).

Sigit juga mengaku mendapat pesan yang menawarkannya menjadi menteri kepolisian.

Jenderal bintang empat itu menegaskan lebih baik men-

jadi petani daripada menjadi menteri kepolisian.

“Bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA, ‘mau ndak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian?’. Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan bapak-ibu sekalian, dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian, dan walaupun saya yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” kata Sigit.

Ia mengatakan posisi Polri di bawah presiden saat ini sudah ideal. Polri bisa menjadi alat negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang harkamtibmas dan hukum.

“Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah bapak presiden, sehingga pada saat presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian yang kemudian ini menimbulkan potensi matahari kembar,” ujarnya.

S e b e l u m n y a

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasaran Yusril Ihza Mahendra mendukung gagasan mengenai adanya kementerian yang menaungi Polri, dalam pembahasan internal Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Dikatakan bahwa hal tersebut sebagaimana Kementerian Pertahanan yang menaungi TNI.

“Semua gagasan tersebut belum menjadi keputusan final. Komisi akan menyampaikan beberapa alternatif rekomendasi kepada Presiden,” ujar Yusril.

Yusril mengatakan sebagian pihak dalam Komisi tetap menghendaki struktur kepolisian seperti saat ini.

Meski begitu pada akhirnya, ia menuturkan keputusan berada di tangan Presiden Prabowo Subianto dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena struktur, tugas, dan pertanggungjawaban Polri dituangkan perinciannya dalam undang-undang, meski Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengaturnya. (*)

Pernah Jadi Duta Merek PT DSI, Dude Herlino Berpeluang Diperiksa



Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak.

J A K A R -TA-Penyidik Subdit II Perbankan Dittipideksus Bareskrim Polri buka peluang memeriksa artis Dude Herlino sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan atau fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI) senilai Rp2,4 triliun.

Pemeriksaan terhadap Dude ini mungkin dilakukan mengingat yang bersangkutan pernah menjadi brand ambassador dari perusahaan.

“Dalam rangka mencari dan mengumpulkan alat bukti ini, maka salah satu yang akan dilakukan oleh tim penyidik adalah semua pihak/semua orang yang dapat memberikan informasi terkait suatu perkara pidana, pastinya akan dipanggil dan dimintai keterangan

gan oleh Tim Penyidik,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Senin (26/1). Jawaban Ade tersebut merespons pertanyaan soal kemungkinan memanggil Dude Herlino.

Dia berkata pemanggilan pihak-pihak terkait untuk kepentingan dan kebutuhan

penyidikan dalam penanganan perkara dugaan fraud PT DSI.

Disampaikan Ade Safri, saat ini pihaknya masih terus mendalami kasus yang sudah ditingkatkan ke penyidikan sejak 14 Januari 2026 lalu.

“Yang jelas penyidik terus bekerja secara profesional ya, transparan dan akuntabel untuk terus

mencari dan menemukan alat bukti,” ucap dia.

Bareskrim Polri sebelumnya menangkap modus penipuan atau fraud yang dilakukan oleh PT DSI dengan nilai kerugian mencapai Rp2,4 T.

Ade Safri mengatakan dugaan penipuan itu dilakukan PT DSI dengan membuat proyek fiktif. Proyek fiktif itu dibuat PT DSI dengan memakai

data penerima investasi (Borrower) yang sudah ada dan dicatut seolah-olah memiliki proyek baru.

“Itulah yang kemudian membuat para Lender ini tertarik, bahwa ada proyek-proyek yang membutuhkan pembiayaan dan mereka masuk untuk melakukan

investasi,” jelasnya pada saat penggeledahan kantor PT DSI, Jumat (23/1).

Tercatat ada 15 ribu korban dugaan penipuan PT DSI dengan total nilai kerugian mencapai Rp2,4 triliun selama periode 2018-2025.

“Korban di periode 2018 sampai 2025, kurang leb-

ih 15.000 Lender (pemberi pinjaman) atau masyarakat,” tuturnya.

“Ini adalah pemilik modal yang diduga disalahgunakan ataupun dalam penyaluran dananya tidak sesuai dengan peruntukannya,” jelasnya. (*)

Buka Musda VI Golkar, Wali Kota Baubau Ajak Kader Perkuat Sinergi Bangun Daerah



Pewarta: Amat Jr

B A U B A U , BP-Wali Kota Baubau yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Baubau La Ode Darus Salam, S.Sos, M.Si secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) VI DPD Partai Golkar Kota Baubau yang digelar Minggu (25/01/2026) di hotel ratu rajawali.

Acara yang dihadiri oleh pengurus DPD I Golkar Sultra, jajaran pengurus DPD II Baubau, serta unsur Forkopimda ini menjadi momen penting bagi partai berlambang pohon beringin tersebut untuk melakukan evaluasi dan konsolidasi internal.

Dalam pidato pembukaannya,

Sekda Kota Baubau La Ode Darus Salam, S.Sos, M.Si menyampaikan apresiasi tinggi terhadap eksistensi Partai Golkar di Kota Baubau. Pihaknya mengakui pentingnya peran partai politik sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan di Negeri Khalifatul Khamis. Dan Partai Golkar merupakan salah satu pilar demokrasi yang matang dan telah banyak berkontribusi dalam menyalurkan aspirasi masyarakat.

"Partai Golkar telah menunjukkan eksistensinya sebagai mitra strategis pemerintah. Musda ini bukan sekadar rutinitas organisasi untuk

memilih nakhoda baru, melainkan momentum evaluasi strategis dan rekonsiliasi pasca-dinamika politik," ujarnya.

Sekda Kota Baubau menggarisbawahi tiga aspek penting yang harus dicapai dalam Musda VI yakni evaluasi strategis dengan memastikan program kerja partai benar-benar menyentuh kepentingan rakyat. Konsolidasi untuk mempererat soliditas internal kader agar tetap satu suara dalam membangun daerah. Dan lahirnya gagasan yang menghasilkan pokok pikiran yang konstruktif demi kemajuan Baubau.

Mengakhiri sambutannya, La Ode Darus Salam

berharap agar siapa pun yang terpilih menjadi Ketua DPD II Golkar Baubau nantinya dapat membawa sinergi yang lebih kuat dengan Pemerintah Kota. Ia menekankan bahwa politik harus menjadi jalan pengabdian dengan mengedepankan kompetisi ide di atas perpecahan.

"Kita butuh kerja sama lintas sektor untuk mewujudkan Baubau yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musda VI DPD Partai Golkar Kota Baubau secara resmi saya nyatakan dibuka," tutupnya disambut tepuk tangan para delegasi dan kader yang hadir.(*)

Wali Kota Baubau HYF Dukung Program Swasembada Pangan



Laporan: Firman

B A U B A U , BP-Wali Kota Baubau H Yusran Fahim, SE bersama Wakil Wali Kota Baubau Ir Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc, Ketua DPRD Kota Baubau Ardin Jufri, ST, Forkompinda, kepala OPD lingkup Pemkot Baubau mengikuti melalui daring gerakan panen raya dan swasembada pangan bersama Presiden RI di Wantilan Kelurahan Ngkarung Karing Rabu (07/01/2026).

Pada kesempatan tersebut, orang nomor satu di Kota Baubau ini menekankan pentingnya sektor pertanian sebagai tulang punggung ketahanan pangan daerah. Oleh sebab

itu, program pemerintah pusat harus didukung untuk menuju swasembada pangan yang tentu saja untuk meningkatkan juga kehidupan petani termaksud pula menjamin ketersediaan stok pangan khususnya di Kota Baubau.

Dikatakan, Pemerintah Kota Baubau akan berkomitmen untuk terus mendukung para petani melalui berbagai program, antara lain penyediaan bantuan bibit unggul, fasilitas pertanian, serta pendampingan teknis. Pihaknya juga mengapresiasi kerja keras para petani dan sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah dan pusat dalam mewujudkan swasembada pangan.

Terkait dengan bantuan mesin pertanian dari pemerintah pusat, Wali Kota Baubau H Yusran Fahim, berharap bisa digunakan oleh petani sebagaimana mestinya untuk manfaat yang lebih besar lagi dalam peningkatan lagi kualitas hasil panen petani.

Sementara itu, Plt Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau Rahma Saraswati Ryha menyampaikan dalam laporan capaian pertanian tahun 2025 yang mengalami peningkatan produksi dan produktifitas tanaman pangan di sawah yang produksinya mencapai 4,31 ton yang mengalami peningkatan sebanyak 4,39 ton.(*)

Optimalisasi Aset Daerah Untuk Perkuat Pelayanan Publik, Yusran-Hamsinah Tinjau Fasilitas Baru Disperindag

Laporan: Andina

B A U B A U , BP-Wali Kota Baubau H Yusran Fahim, SE bersama Wakil Wali Kota Baubau Ir Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Si meninjau fasilitas baru Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Baubau yang merupakan hasil Renovasi gedung lama yang dirangkaian syukuran penempatan gedung baru tersebut pada awal tahun 2026 Rabu



(07/01/2026).

Wakil Wali Kota Baubau Ir Wa Ode Hamsinah Bolu,

M.Sc dalam keterangan persnya saat menghadiri operasional kantor baru

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Baubau yang berlokasi di Kelu-

rahan Batulo Rabu (07/01/2026) bersama Wali Kota Baubau H Yusran Fahim, SE menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik seiring dengan fasilitas anyar yang tersedia.

"Pergantian kantor Disperindag ini sebenarnya bangunan lama ya, tapi direnovasi. Suatu hal, alhamdulillah ini pemanfaatan yang baik, jadi kita tidak harus membangun baru. Pemanfaatan anggaran yang seminimal, se efisien mungkin. Tadi saya lihat pemugarannya cukup bagus,

mudah-mudahan ini lebih nyaman di tempat yang baru ya. Sehingga bisa meningkatkan kinerja Pak kadis dan teman-teman di Disperindag," ujarnya.

Wa Ode Hamsinah Bolu berharap untuk kerja bersama lebih baik lagi untuk 2026. Sebab, di tahun 2025 masih banyak hal-hal yang dikatakan kurang sempurna, tidak perfect. "Mohon maaf untuk itu, mudah-mudahan di 2026 ini kita bisa lebih baik dan akhirnya pencapaiannya juga paling bagus," ungkapnya.

Sementara itu, Kadis Peindag Kota Baubau H La Ode Ali Hasan, SE, M.Si menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan penuh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau dalam penyediaan fasilitas ini. Dirinya akan siap menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Penempatan kantor baru ini menjadi motivasi baru bagi untuk terus berinovasi dan kerja bersama dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat yang lebih baik ke depan.(*)